

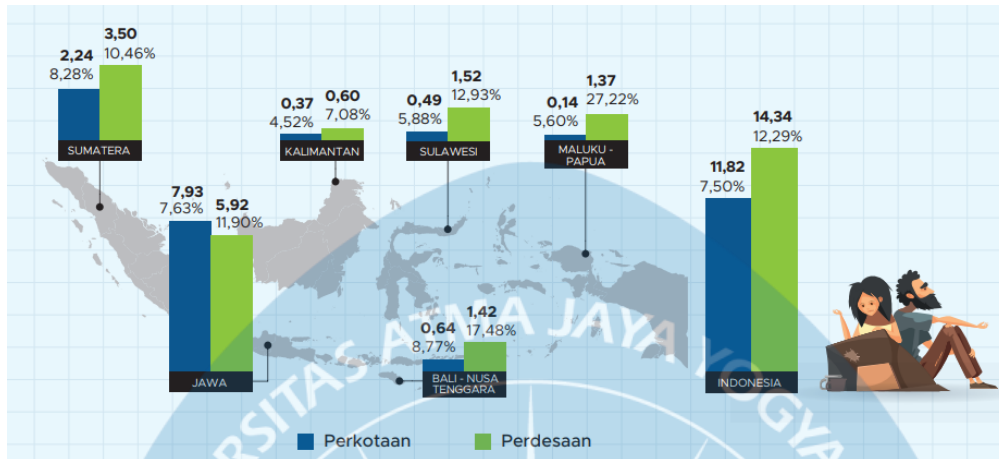
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang banyak dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensional dan kompleks yang masih menjadi sebuah tantangan besar bagi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) (2021), pada maret 2021 tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,28 persen atau sekitar 26,42 juta orang masih dalam belenggu masalah kemiskinan. Menurut Sudiana & Sudiana (2015), kemiskinan sudah menjadi masalah yang serius di Indonesia maka harus ditanggulangi atau paling tidak dikurangi, pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan, namun demikian kemiskinan masih menjadi masalah yang berkepanjangan.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang jauh lebih kompleks karena kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah jenis pekerjaan, jumlah pendapatan, perumahan, pendidikan, namun kemiskinan juga berkaitan dengan masalah sosial seperti keturunan sosial, kriminalitas, kekerasan dan lain sebagainya. Menurut Tamboto & Manongko (2019), pemerintah indonesia belum mampu menghadapi serta menyelesaikan permasalahan kemiskinan, melainkan pemerintah dapat mengurangi dan meminimalkan permasalahan kemiskinan, oleh sebab itu diperlukan strategi kebijakan untuk menangani masalah kemiskinan dengan tepat.



Sumber: BPS Indonesia 2022

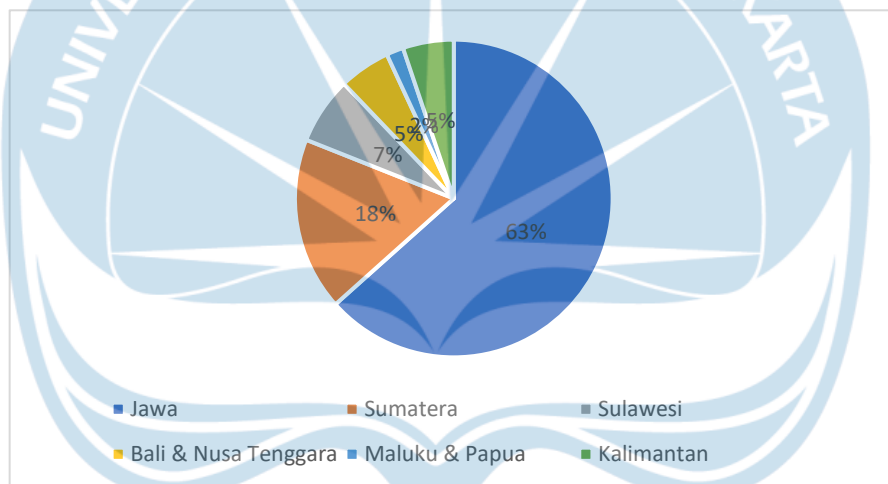
Gambar 1. 1
Peta Kemiskinan Provinsi di Indonesia maret tahun 2022

Berdasarkan gambar peta sebaran kemiskinan menurut pulau di Indonesia pada maret tahun 2022 terlihat bahwa Indonesia masih terbelenggu dalam masalah kemiskinan yaitu dengan menduduki angka 7,50% kemiskinan di perkotaan dan 12,29% kemiskinan di perdesaan. Di antara 6 pulau besar di Indonesia, Pulau Jawa memiliki persentase kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 7,63% di perkotaan dan 5,92% di perdesaan. Pulau yang memiliki persentase kemiskinan terendah adalah Pulau Kalimantan yaitu sebesar 4,53% di perkotaan dan 7,08% di perdesaan.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting di dalam proses produksi, tenaga kerja juga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam produksi barang atau jasa untuk memenuhi permintaan konsumen serta kebutuhan masyarakat. Menurut *Internasional Labour Organization* (2011), pekerjaan sektor informal identik dengan pekerjaan yang kurang layak, tingkat pendapatan yang

rendah, resiko pekerjaan yang tinggi, serta tidak mendapat jaminan atau perlindungan sosial. Dartanto *et al.* (2020), dalam meningkatkan kesejahteraan dibutuhkan peralihan tenaga kerja dari sektor informal menjadi sektor formal.

Tenaga kerja formal merujuk pada pekerjaan yang memiliki status kerja yang sudah diakui oleh lembaga hukum, seperti tenaga kerja yang bekerja di sektor formal industri, perdagangan serta jasa, dimana tenaga kerja formal mendapatkan manfaat jaminan sosial dan hak-hak tenaga kerja.



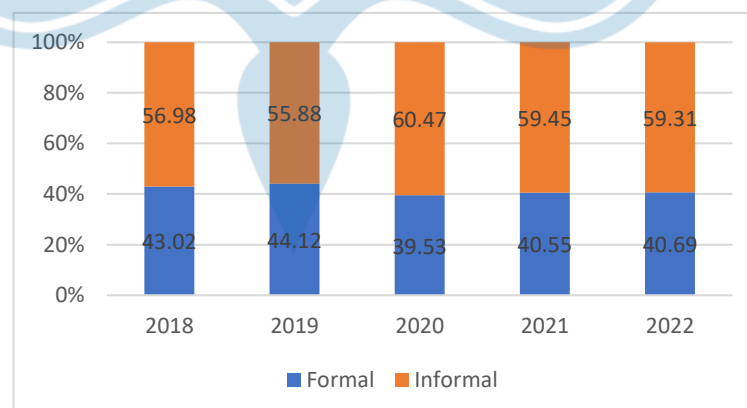
Sumber: BPS Indonesia (data diolah)

Gambar 1. 2
Persentase Tenaga Kerja Formal di Indonesia tahun 2017

Berdasarkan gambar 1.2 persentase tenaga kerja formal di Indonesia, terlihat bahwa Pulau Jawa menduduki posisi tertinggi presentase tenaga kerja formal dengan angka sebesar 63% yang berarti, sebagian besar tenaga kerja formal berada di Pulau Jawa dan 37% lainnya berada di pulau luar Pulau Jawa.

Pulau Jawa adalah salah satu wilayah yang memiliki populasi dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Indonesia. Menurut BPS (2019), Pulau Jawa mendominasi tenaga kerja formal dibandingkan pulau lain yang ada di Indonesia. Pulau Jawa memiliki tingkat pembangunan yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia, namun provinsi yang berada di Pulau Jawa masih dihadapkan oleh masalah kemiskinan yang tergolong tinggi. Maka dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk memilih Pulau Jawa sebagai lokasi penelitian.

Menurut Lestyasari (2013), suatu kemajuan perekonomian sebuah negara dapat dilihat dari tingginya tenaga kerja di sektor formal dibandingkan tenaga kerja sektor informal, meskipun penyerapan tenaga kerja sektor informal sangat tinggi tetapi nilai tambah yang diberikan oleh tenaga kerja sektor informal tidak sebesar nilai tambah yang diberikan oleh tenaga kerja sektor formal, hal ini dikarenakan tenaga kerja sektor formal terdiri dari tenaga kerja profesional dengan kualifikasi pendidikan serta keterampilan yang lebih memadai.



Sumber: BPS Indonesia (data diolah)

Gambar 1. 3
Jumlah Tenaga Kerja Formal dan Informal Pulau Jawa (persen)

Menurut BPS (2022), tenaga kerja di Indonesia didominasi oleh tenaga kerja sektor informal terlihat pada data tahun 2022 tenaga kerja formal mengalami penurunan sebesar 2,33% dibandingkan tahun 2018, yakni 43,02% turun menjadi 40,69% pada tahun 2022. Sementara itu terjadi peningkatan tenaga kerja informal 2,33% pada periode 2018-2022, yaitu sebesar 56,98% pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 59,31% pada tahun 2022.

Sebagai sektor yang padat modal, tenaga kerja sektor formal merupakan penyokong perekonomian Indonesia dimana kontribusi tenaga kerja sektor formal lebih besar dibandingkan tenaga kerja sektor informal. Tenaga kerja sektor formal juga relatif aman atau tidak rentan mengalami penurunan karena modal yang dimiliki.

Salah satu faktor yang memiliki kontribusi terhadap masalah kemiskinan adalah rendahnya upah tenaga kerja, upah minimum merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Pengaturan pengupahan harus mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, maka dari itu penetapan jumlah upah minimum harus dikaji dengan seksama agar semua pihak dapat mendapatkan manfaat yang sama.

Menurut Sholeh (2005), tingkat upah mencerminkan tingkat produktivitas tenaga kerja, sehingga jika terjadi kenaikan upah diharapkan produktivitas tenaga kerja juga akan naik, maka dari itu kenaikan upah dari sisi penawaran tenaga kerja memiliki dampak positif, di sisi lain kenaikan upah dapat mengurangi *aggregate*

employment dimana kenaikan upah akan berdampak terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1. 1
Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2022 (Rupiah)

Provinsi	Tahun	Upah Minimum	Provinsi	Tahun	Upah Minimum
DKI Jakarta	2018	3.648.036.00	DI Yogyakarta	2018	1.454.154.00
	2019	3.940.973.00		2019	1.570.923.00
	2020	4.276.350.00		2020	1.704.608.00
	2021	4.416.186.00		2021	1.765.000.00
	2022	4.641.854.00		2022	1.840.916.00
Jawa Barat	2018	1.544.361.00	Jawa Timur	2018	1.508.895.00
	2019	1.668.373.00		2019	1.630.059.00
	2020	1.810.351.00		2020	1.768.777.00
	2021	1.810.351.00		2021	1.868.777.00
	2022	1.841.487.00		2022	1.891.567.00
Jawa Tengah	2018	1.486.065.00	Banten	2018	2.099.385.00
	2019	1.605.396.00		2019	2.267.990.00
	2020	1.742.015.00		2020	2.460.997.00
	2021	1.798.979.00		2021	2.460.996.00
	2022	1.812.935.00		2022	2.501.203.00

Sumber: BPS Indonesia (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa upah minimum 6 provinsi yang terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten relatif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun terlihat bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan upah yang paling tinggi di Pulau Jawa yaitu sebesar Rp.4.641.854 pada tahun 2022 dan Jawa tengah sebagai provinsi dengan upah minimum terendah sebesar Rp.1.812.935 pada tahun 2022.

Kenaikan upah minimum berdampak langsung terhadap tenaga kerja provinsi, karena upah minimum adalah sumber pendapatan bagi buruh, dengan naiknya upah berarti pendapatan tenaga kerja juga akan bertambah, karena bertambahnya pendapatan akan mendorong meningkatnya permintaan di pasar.

Kenaikan upah yang terlalu datar tidak menguntungkan tenaga kerja, sebaliknya kenaikan upah yang terlalu drastis dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu tingkat kenaikan upah minimum perlu diketahui dan disetujui oleh semua pihak. Jika upah minimum ditetapkan dengan benar dan diimplementasikan dengan efektif, hal ini dapat meningkatkan pendapatan tenaga kerja, mengurangi kesenjangan pendapatan dan secara efektif dapat mengurangi kemiskinan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis Peran Tenaga Kerja Formal dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2015-2022.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang disampaikan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh persentase tenaga kerja formal terhadap persentase kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2015-2022?
2. Bagaimanakah pengaruh upah minimum provinsi terhadap persentase kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2015-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh presentase tenaga kerja formal terhadap persentase kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2015-2022

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum provinsi terhadap persentase kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2015-2022

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, dengan memahami peran tenaga kerja formal dan upah minimum terhadap pengentasan kemiskinan, memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan strategi yang berkesinambungan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan memastikan pemerataan ekonomi.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pembelajaran dan wawasan kepada pembaca, terutama mengenai peran tenaga kerja formal dan upah minimum terhadap pengentasan kemiskinan.
- 3) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan dikembangkan kembali oleh peneliti selanjutnya menggunakan variabel lain yang belum diteliti seperti variabel tingkat pendidikan, tenaga kerja formal perempuan atau laki-laki, dan jumlah pengangguran.

1.5. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah disampaikan, maka penelitian ini dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Diduga persentase tenaga kerja formal berpengaruh negatif terhadap persentase kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2015-2022.

- 2) Diduga upah minimum provinsi berpengaruh negatif terhadap persentase kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2015-2022.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdapat sub bab. Penjelasan sistematika penulisan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian yang diantaranya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasam teori dan studi terkait yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai acuan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari data, sumber data dan teknik pengumpulan data, model, alat analisis dan definisi operasional variabel.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan sesuai ruang lingkup fokus penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas

